

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi kebijakan pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik dan menunjukkan performa yang cukup positif, meskipun belum masih sepenuhnya optimal. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dimana kebijakan pemekaran desa ini belum sepenuhnya rampung terlaksanakan dikarenakan sempat menghadapi kendala seperti kondisi tahun politik yang menyebabkan pemerintah pusat sempat mengeluarkan Moratorium pemekaran desa yang menghambat proses pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing. Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dibawakan oleh Merilee S. Grindle, kesuksesan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama yakni isi kebijakan dan konteks kebijakan.

Pada variabel isi kebijakan menunjukkan bahwa proses pemekaran desa telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, yakni Permendagri No. 1 Tahun 2017 dan Perbup Kampar No. 13 Tahun 2022, yang dimulai dari prakarsa masyarakat hingga tahapan persiapan menjadi desa definitif. Masyarakat sebagai pihak yang menginisiasi pemekaran sekaligus sasaran kebijakan menunjukkan tingkat partisipasi dan penerimaan yang tinggi terhadap kebijakan ini. Tujuan kebijakan yang menyangkut peningkatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, dan peningkatan layanan publik, telah mulai dirasakan masyarakat terutama pada aspek pelayanan administrasi yang jadi lebih mudah. Namun, tujuan jangka panjang seperti peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan anggaran yang masih bergantung pada APBDes desa induk.

Pada variabel konteks kebijakan terlihat bahwa terdapat sebuah sinergi kepentingan yang cukup baik antara kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam

proses pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing. Masyarakat yang bertindak sebagai inisiator yang menginginkan pemekaran desa menunjukkan bahwa keinginan untuk mendapatkan anggaran desa menjadi motif utama mereka dalam pemekaran desa ini. Sinergi positif ini juga dibarengi dengan konsistensi dan kepatuhan aktor pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tahapan implementasi kebijakan sesuai dengan peraturan yang mengatur.

Seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan pemekaran ini menunjukkan keberpihakan yang baik terhadap kelangsungan pemekaran desa baik keberpihakan Pemerintah maupun dukungan dari masyarakat. Masyarakat menunjukkan dukungan dan penerimaan yang baik dimana hal ini sejalan dengan keinginan mereka untuk mewujudkan desa definitif baru yang akan mendapatkan anggaran desa tersendiri nantinya. Meskipun sempat mengalami hambatan akibat dinamika politik nasional, seperti moratorium pemekaran desa selama tahun politik 2024 dan adanya isu netralitas ASN yang menyeret salah satu pelaksana teknis, namun secara keseluruhan proses tetap berjalan sesuai regulasi. Secara keseluruhan, kebijakan ini berada pada jalur yang tepat dalam menuju pencapaian keseluruhan tujuan kebijakan, namun memang hal ini masih dicapai dengan bertahap dan secara parsial.

6.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar maka peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi:

1. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu mempercepat proses pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing untuk menjadi Desa Definitif dikarenakan secara administratif dan kondisi masyarakat Desa Pulau Belimbing telah siap untuk menjadi Desa Definitif.
2. Saat Keputusan terkait nasib Desa Persiapan Pulau Belimbing ditentukan diperlukan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mempersiapkan seluruh tahapan lanjutan agar dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.

3. Kedepannya diperlukan antisipasi dinamika politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan berkaca pada kondisi yang terjadi saat Pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing seperti moratorium pemekaran desa pada tahun politik 2024 dan isu netralitas ASN
4. Penelitian terkait pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing ini dapat dilanjutkan kembali dengan melihat perspektif dampak kebijakan pemekaran Desa Persiapan Pulau Belimbing terhadap masyarakat secara lebih lanjut.

